

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi dan demokrasi adalah dua hal yang senantiasa dibicarakan beriringan di tengah masyarakat. Hal ini berdasarkan pada suatu asumsi bahwa komunikasi yang baik adalah tolok ukur kemajuan demokrasi di Indonesia. Sementara demokrasi yang baik ditunjukkan oleh keadaan komunikasi yang baik pula. Di samping itu determinasi antara komunikasi dan demokrasi di Indonesia juga diyakini adanya oleh Gutama (2012)

Keberadaan komunikasi di dalam sistem besar demokrasi bagi pemerintahan Indonesia menjadi penting sebagai sarana awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat (Arumsari et al., 2020). Semua permasalahan mesti diselesaikan dengan dialog. Semua permasalahan juga memiliki potensi untuk menjadi konflik yang lebih besar.

Indonesia secara nasional sebenarnya mempunyai suatu mekanisme demokrasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Mekanisme ini idealnya berbentuk dialog antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat luas. Hanya saja dewasa ini tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan baik.

Permasalahan yang muncul tidak hanya berskala nasional saja. Ada juga skala kedaerahan. Masalah di daerah juga mesti diselesaikan secara kedaerahan juga, itu lah alasan kenapa anggota DPR juga dipilih di daerah, biasanya disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mekanisme dan sistem yang ada di DPRD persis sama dengan yang ada di DPR secara nasional.

Demi menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat melalui demokrasi, ilmu komunikasi secara teknis mempunyai kajian yang lebih spesifik tentang ini. Inilah yang disebut dengan kajian komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan sebuah proses penyampaian pesan yang bermuatan politik dan dilakukan oleh aktor politik berkaitan dengan kekuasaan (Nimmo, 2014:8). Komunikasi politik didefinisikan oleh Denton dan Woodward dalam Heryanto (2018:67) adalah sebuah diskusi yang murni membicarakan tentang pengalokasian sumber-sumber daya (*resources*), kewenangan resmi seseorang yang diberi kekuasaan (untuk membuat peraturan, keputusan legislatif dan eksekutif), dan sanksi-sanksi resmi (dari apa yang Negara berikan berbentuk *reward* atau hukuman).

Komunikasi politik memiliki peranan penting bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sebagai wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat, dipilih berdasarkan daerah pemilihan, mereka harus turun ke masyarakat untuk menjemput, memperjuangkan aspirasi masyarakat, serta memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap aspirasi masyarakat yang diamanahkan. Dalam rangka menjemput aspirasi masyarakat tersebut, anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses ke daerah pemilihannya masing-masing.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga peranan penting. Pertama, sebagai agen perumus agenda bagi masyarakat yang diwakilinya. Kedua, DPRD berperan sebagai lembaga yang mengemban misi pengelolaan konflik dalam masyarakat. Ketiga, DPRD adalah pengemban peran integratif dalam masyarakatnya. Peran perwakilan rakyat yang melekat pada DPRD bisa dimaknai sebagai peran keperantaraan DPRD, tidak hanya

menjadi perantara yang menjembatani pemerintah (eksekutif) dengan rakyatnya namun juga menjembatani ketegangan dari berbagai segmen dalam masyarakat yang saling memperjuangkan kepentingannya (Sianturi, 2014:4).

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 324 disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD antara lain: (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Penjelasan pasal 324 bahwa pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Sebagai wujud pertanggungjawaban secara moral tersebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat harus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diamanatkan kepadanya. Sepanjang perjuangan ini, Anggota DPRD tentu saja dituntut untuk bisa mendengarkan dengan baik apa yang diinginkan oleh masyarakat yang kemudian diperjuangkan secara politik pada agenda lain, pada perjuangan ini komunikasi adalah titik utamanya. Untuk itu, perlu komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.

Berdasarkan penelitian tahap awal, tahapan proses komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ada saat ini, ada empat. Pertama, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat menghimpun setiap aspirasi masyarakat dan dituangkan dalam

bentuk laporan. Berdasarkan laporan tersebut diseleksi menjadi usulan pokok pokok pikiran anggota DPRD. Kedua, laporan tersebut diteruskan ke eksekutif untuk dilakukan sinkronisasi sesuai dengan RPJMD dan RPJD. Ketiga, selanjutnya aspirasi tersebut diteruskan ke SKPD terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Keempat, aspirasi yang terealisasi dikomunikasikan kepada anggota DPRD dan masyarakatnya. (keuda.kemendagri.go.id)

Penginputan aspirasi saat ini, yaitu dilakukan dalam satu tahun sekali yang disebut dengan usulan pokok pokok pikiran anggota DPRD provinsi Sumatera Barat berdasarkan dari usulan masyarakat di daerah pemilihan masing masing serta hasil kunjungan kerja komisi masing-masing anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Satu tahun sebelum tahun anggaran harus dilakukan penginputan aspirasi masyarakat lewat sistem informasi daerah (SIPD). Sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) digunakan untuk proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan agar memiliki dukungan penyusunan kebijakan yang lebih *actual* dan *komprehensif* dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendaliannya, evaluasi program dengan menggunakan sistem informasi daerah. (keuda.kemendagri.go.id).

Adapun aspirasi yang senantiasa diperjuangkan oleh anggota DPRD Sumatera Barat adalah aspirasi yang berbentuk fisik dan non-fisik. Aspirasi fisik yaitu aspirasi terkait dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat seperti, pembangunan jalan, jembatan, bendungan, alat alat pertanian, alat alat perikanan rumah ibadah, MCK, Drainase, Bibit perikanan, bibit pertanian dll. Sementara aspirasi Non Fisik yaitu seperti peningkatan Kapasitas SDM, Pelatihan, pengembangan kompetensi dan kebijakan atau regulasi yang

dibutuhkan masyarakat terkait keamanan, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat

Hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada satuan perangkat kerja (SKPD) yang mengelola aspirasi, ada beberapa permasalahan diantaranya, adanya aturan-aturan, standarisasi yang mengikat dalam proses perencanaan, dan pengadaan yang harus dipenuhi oleh SKPD. Apa yang diinginkan oleh masyarakat tidak dapat dipenuhi secara maksimal. Untuk itu, diperlukan peranan komunikasi politik untuk memberitahu dan mengedukasi masyarakat tentang aturan-aturan yang berlaku.

Adanya rangkaian dan mekanisme yang panjang dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengharuskan anggota DPRD memiliki kemampuan komunikasi yang lebih. Meski dengan kemampuan komunikasi yang baik, tetapi pengalaman komunikasi yang didapatkan belum tentu juga baik dan ramah perasaan. Inilah asumsi utama yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Pengalaman komunikasi yang didapat sepanjang kegiatan reses tentu saja berbeda pada tiap-tiap anggota DPRD, apalagi hal ini berkaitan dengan daerah pemilihannya. Kondisi, kebutuhan, keinginan, dan masalah masyarakat yang berbeda pada tiap-tiap daerah pemilihan memberikan pengalaman komunikasi yang berbeda pula bagi anggota DPRD. Bahkan tidak menutup kemungkinan anggota DPRD juga mendapatkan pengalaman komunikasi yang unik. Penolakan, tingkah lucu, gelagat yang aneh, perdebatan diantara masyarakat, ancaman, sanjungan yang berlebihan, hingga sikap apatis

masyarakat mungkin saja menjadi pengalaman unik bagi anggota DPRD. Inilah yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan.

Pengalaman tersebut diungkap secara ilmiah pada penelitian ini. Untuk mengungkap dan menganalisis pengalaman ini, peneliti akan menggunakan pendekatan fenomenologi. Dalam konteks fenomenologi, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat adalah aktor yang melakukan tindakan sosial dalam melakukan komunikasi politik dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Beberapa penelitian sebelumnya sudah peneliti tinjau juga. Ada yang hanya berfokus pada komunikasi politik anggota DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, sedangkan penelitian ini fokus pada tahapan pengalaman komunikasi politik anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Alasan peneliti memilih fokus penelitian ini karena aspirasi masyarakat tidak hanya diserap, tetapi juga harus diperjuangkan oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Ini lah yang menjadi novelty penelitian ini.

Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan komunikasi politik kepada eksekutif hasil perjuangan aspirasi tersebut juga dikomunikasikan kembali masyarakat. Hasil perjuangan aspirasi masyarakat menjadi pembuktian dan tanggung jawab moralitas anggota DPRD terhadap masyarakat yang diwakilinya. Peneliti juga membandingkan dengan penelitian yang relevan dalam menggali pengalaman individu (personal) yang melakukan komunikasi politik. Hal ini dapat mengungkapkan makna esensial terhadap pengalaman komunikasi politik anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut: Bagaimana pengalaman komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengalaman komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihannya.
2. Untuk menganalisis makna esensial dari pengalaman komunikasi politik anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran serta wawasan baru bagi pengembangan keilmuan peneliti dan *stakeholder* terkait dengan kegiatan komunikasi politik, terutama anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Dapat menjelaskan, mendeskripsikan, dan menarasikan pengalaman

komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini, yaitu untuk mengasah ketajaman analisis penulis dalam penerapan teori yang dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam kegiatan penelitian. Selain itu, dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya di bidang komunikasi politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1.4.3 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana dalam mewujudkan keinginan menyampaikan aspirasi yang dilakukan bersama anggota DPRD sehingga tercipta komunikasi yang efektif.

b. Bagi Anggota DPRD

Sebagai bahan masukan agar lebih baik lagi dalam kegiatan penyerapan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama pada kegiatan reses agar terciptanya komunikasi yang efektif dan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.